

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty Bramantyo, S. (n.d.). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Salah Satu Syarat Terwujudnya Good Governance (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kediri). *jimfeb.ub.ac.id*.
- Bastian, I. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (kedua). Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, I. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (3 ed.). Erlangga. Jakarta.
- Batubara, Z. (2019). Akuntansi Dalam Pandangan Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 66–77. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.163>
- Biro Analisa, A. (2015). *Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Indonesia*. 1–5.
- Fakhrurazi. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Artikel*. <http://Fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standarakuntansi-pemerintahan/>.
- Harmain, H. (2015). *AKUNTANSI MASJID.pdf* (hal. 41). Medan:FEBI UIN-SU.
- Hasanah, F. A. (2017). *Akuntansi pemerintahan*. Bogor : Penerbit IN MEDIA.
- Hendra Harmain, Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Hastuti Olivia, Desy Farina, Herry Wahyudi, L. S. (2019). *Akuntansi Syariah*. Madenatera.
- Indra, L. dan T. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrua. *The Journal of the Japan Society for Respiratory Endoscopy*, 37(3), 343.
- Kamila K, F. Y. S. (2022). *The Effect of Accounting on Hajj Savings at Pt Bank Sumut Gunung Tua Branch Office Pengaruh Akuntansi Terhadap Tabungan Haji Pada Pt Bank Sumut Kantor Cabang Gunung Tua*. 3(4), 1491–1506.
- Kamilah, Dr. Saparuddin Siregar, Drs. Mhd Syahman Sitompul, Hendra Hermain, H. H. (2014). *Buku Akuntansi Syariah-Kasus Implementasi di Masy an. Kamilah.pdf*. Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
- Kamilah, S. E. P. (2022). *Analysis of PSAK 16 Accounting Implementation at BAPPEDA of North Sumatra Province Analisis Implementasi Akuntansi PSAK 16 pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara*. 1(2), 59–66.
- KSAP, (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan). (2010). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemeritah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrua Pemda.
- Kusmilawaty, Rizki Arvi Yunita, S. (2019). *ANALISIS PENERAPAN SISTEM*

AKUNTANSI INSTANSI. 3, 101–113.

- Kusuma, R. S. (2013). *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)*.
- Kusumastuti, A. dan A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Langelo, F. (2015). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. 3(1), 1–8.
- M.S, Kusufi dan Abdul, H. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik* (4 ed.). Salemba Empat, Jakarta.
- Mahsun, Mohammad, Sulistyowati Firma., P. H. A. (2013). *Akuntansi Setor Publik* (ketiga). BPFE. Yogyakarta.
- Oktaviana, U. K. (2012). Gharar Dalam Akuntansi AkruaI. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 1(1). <https://doi.org/10.18860/em.v1i1.1877>
- PP RI No. 71 Tahun, 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- PP RI No 58, T. 2005. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- sitorus Selvina, L. dan S. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Berdasarkan PP. NO. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Penelolan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *The Journal of the Japan Society for Respiratory Endoscopy*, 37(3), 343.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- SULAEMAN. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(1), 98–117.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian kualitatifn: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Malang : Akademi Pustaka.
- Tarigan, A. A. (2015). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Tim Penyempurnaan Terjemahaan Al-Qur'an, (2016-20019). (2019). *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Wardani, Pramita Sukma SE, M. (2020). *Akuntansi Pemerintahan*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Laporan Keuangan

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pendapatan - LRA	1.a	4.707.852.440.866,16	4.121.831.212.572,01	86,83	5.510.788.106.208,31
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	1.a.1	1.813.809.461.511,16	1.509.429.049.167,01	83,21	1.822.665.892.248,31
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	1.a.1.a)	1.359.509.058.050,00	1.105.850.162.042,00	80,95	1.472.414.654.505,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.a.1.b)	94.865.269.721,14	69.660.151.517,15	73,52	90.431.692.016,04
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1.a.1.c)	15.784.624.073,00	17.031.106.538,27	112,96	14.638.487.560,00
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	1.a.1.d)	342.750.799.717,02	206.078.628.469,59	59,95	252.101.048.107,27
Pendapatan Transfer - LRA	1.a.2	2.707.380.007.355,00	2.478.920.402.405,00	91,53	3.101.978.083.968,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.a.2.a)	2.117.360.207.355,00	2.056.323.073.078,00	97,11	2.166.807.334.247,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	1.a.2.a.1 (1)	204.694.601.000,00	214.341.620.921,00	104,73	135.512.655.016,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.a.2.a.2 (2)	3.145.626.000,00	2.843.349.483,00	90,38	3.602.056.517,00
Hutang Insentif Umum - LRA	1.a.2.a.3 (3)	1.860.058.851.000,00	1.493.919.764.000,00	80,31	1.660.220.912.000,00
Dana Alokasi Khusus - LRA	1.a.2.a.4 (4)	348.592.969.355,00	345.110.339.574,00	99,00	357.393.699.115,00
Pendapatan Transfer Pemerintahan Daerah Lainnya - LRA		0,00	8.538.533.000,00	0,00	0,00
Dana Penyalangan - LRA		0,00	8.538.533.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintahan Daerah Lainnya - LRA	1.a.2.b)	660.000.000.000,00	414.168.796.427,00	62,72	1.244.070.749.711,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	1.a.2.b.1 (1)	650.000.000.000,00	414.168.796.427,00	63,72	1.245.070.749.711,00
Unggahan Keuangan - LRA	1.a.2.b.2 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Unggahan Keuangan dan Pemestahan Daerah Provinsi Lainnya - LRA	1.a.2.b.3 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	1.a.3	176.982.780.000,00	133.171.760.000,00	75,42	267.224.140.000,00
Pendapatan Hibah - LRA	1.a.3.1 (1)	176.982.780.000,00	133.171.760.000,00	75,42	267.224.140.000,00
Belanja	1.b	5.257.056.901.210,83	3.801.483.319.313,86	72,31	6.016.288.700.881,01
Belanja Operasi	1.b.1	4.294.970.117.001,45	3.514.099.701.070,27	81,84	4.856.028.281.641,88
Belanja Pegawai	1.b.1.a)	1.081.050.665.489,18	1.010.220.871.178,91	92,70	1.790.919.201.001,00
Belanja Barang dan Jasa	1.b.1.b)	1.903.350.923.000,27	1.509.401.360.294,36	79,31	2.020.720.028.702,04
Belanja Modal	1.b.1.c)	310.567.328.592,00	273.555.760.386,00	88,09	254.070.938.982,00
Belanja Bantuan Sosial	1.b.1.d)	10.100.000.000,00	1.711.250.000,00	16,84	0.292.300.000,00

Lampiran Keuangan Periode Medan Tahun 2020

Urutan	Ref	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Modal	1.b.2)	447.981.463.338,00	308.278.278.057,33	68,81	982.861.248.694,74
Belanja Modal Tanah	1.b.21.a)	69.813.037.609,00	20.687.014.370,00	29,71	24.746.094.000,00
Belanja Modal Perawatan dan Mesin	1.b.21.b)	164.181.345.778,00	129.850.698.107,00	79,09	220.035.041.073,13
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.b.21.c)	78.349.252.882,03	74.701.208.791,00	95,34	240.827.998.427,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan	1.b.21.d)	104.006.730.400,00	81.829.575.480,33	78,66	487.234.704.167,00
Belanja Modal Asat Tetap Lainnya	1.b.21.e)	1.531.096.669,00	1.209.815.300,00	79,02	20.010.808.025,01
Belanja Tak Terbaga	1.b.3)	510.000.000.000,00	168.285.809.385,95	33,00	599.213.744,63
Belanja Tak terbaga	1.b.31.a)	510.000.000.000,00	168.285.809.385,95	33,00	599.213.744,63
Transfer	1.c	1.810.493.180,00	1.800.881.180,00	99,47	1.436.985.100,00
Transfer Bantuan Keuangan		1.810.493.180,00	1.800.881.180,00	99,47	1.436.985.100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.810.493.180,00	1.800.881.180,00	99,47	1.436.985.100,00
Burplus/Defisit	1.d	(496.814.625.533,37)	128.276.982.078,46	(25,82)	458.042.420.125,30
Pembayaran	1.e				
Penerimaan Pembayaran	1.e.1)	608.814.625.533,37	606.651.962.864,37	99,97	68.608.840.240,07
Penggunaan SILPA	1.e.11.a)	608.814.625.533,37	606.651.260.365,37	99,97	67.316.969.942,05
Koreksi SILPA	1.e.11.b)	0,00	702.440,00	0,00	1.201.030.298,02
Pengeluaran Pembayaran	1.e.2)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
Penyerahan Modal/Investasi		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Neto		496.814.625.533,37	496.651.962.864,37	99,97	48.608.840.240,07
Bisa Lebih/Pembayaran Anggaran (BILPA)		0,00	624.928.944.942,83	0,00	506.651.260.365,37

WALIKOTA MEDAN,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Lampiran 2 :

Daftar Wawancara

1. Apa yang ibu pahami tentang SAP berbasis akrual dan apa yang membedakannya dengan SAP berbasis kas?
2. Apakah ibu menganggap menggunakan SAP berbasis kas lebih sulit daripada SAP berbasis akrual?
3. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, khususnya badan pengelolaan keuangan daerah, untuk melaksanakan PP 71 ini?
4. Apakah ada pendekatan khusus yang digunakan oleh para pengelola keuangan yang ada di lokasi ini saat menerapkan PP 71 ini?
5. Apa saja kendala yang mungkin dihadapi saat menerapkan SAP berbasis akrual ini?
6. Apakah seluruh tenaga kerja yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini memiliki kemampuan untuk menggunakan SAP berbasis akrual untuk mendukung optimalisasi tugas yang dilakukan pemerintah daerah?
7. Bagaimana dengan keuntungan dan kemajuan perkembangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual ini?
8. Apa yang harus dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan SAP berbasis akrual ini?
9. Apa kendala yang Anda temui saat menerapkan SAP berbasis akrual ini?
10. Bagaimana pemerintah daerah dapat mengubah peraturan pemerintah seperti ini?

Lampiran 3 :

Dokumentasi Wawancara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Khaira Zahra Nasution
2. Nim : 0502193162
3. Tempat/tgl lahir : Medan, 23 Mei 2001
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Sidomulyo Gg. Pribadi Dusun IV Kel. Sei Rotan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD
2. Tamatan SMP Swasta Prayatna Medan Berijazah Tahun 2016
3. Tamatan SMA Negeri 11 Medan Berijazah Tahun 2019
4. Tamatan Akademik



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN